

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Direktorat Bina Perawatan, 2006, *Buku Penelitian Dan Penilaian Jenis dan Mutu Basan dan Baran*, direktorat Jenderal Perasyarakatan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar grafika, Jakarta, 2007.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhansil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marjuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Media Prima Aksara.
- Priyanto, Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Ombak.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadjiyono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang.
- Sahetapy, J.E., *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Setiadi, E., *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2010.
- Simajutak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Sjawie,Hasbullah F,2015, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, Jakarta, Kencana.

Soekanto,Soedjono, 1986,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta

Soekanto,Soerdjono , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sulista,Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Swante Adi Krisna, 2016, *Pidana Umum dan Pidana Khusus*.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press.

Jurnal :

Nugoro,Hibnu,2013,"Efektifitas Fungsi Koodinasi dan Supevisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK",*Jurnal Dinamia Hukum*, Vol.13 No.3 September 2013, FH Unsoed.

Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto , Laely Wulandari, 2011. *Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)*. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)".

Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2014,KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK,Sri Nawatmi,Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang.

Laphir *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*.

Skripsi :

Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto , Laely Wulandari, 2011, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)* ", Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).

Joelman Subaidi, 2011, *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011.

Fitri Nurharini Istiqomah, 2013, *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Studi Kasus di Polresta Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Laisiana Irvianti, 2013, *"Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)"*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Margaretha Yesicha Priscyllia, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, "Pemiskina Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi".

Dyani, Vina Akfa, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti Dalam Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Perundang- Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Barang Sitaan Dan Benda Rampasan Negara.

Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

Peraturan Bersama KAPOLRI, Jaksa Agung RI, KPK, Menteri Hukum dan HAM RI No. 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; No: KEPB-10.H.03.02 Tahun 2011; No: M.HH-10.HM.03.02 Tahun 2011; No: 199/KMA/SKB/XII/2011; No: 219/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35 PK 03.10/2002.

SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.

SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan.

Surat JA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.

Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985.

Sumber Lain:

[//googleweblight.com/?lite_url=http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/&ei=LCpOGAHu&lc-id-ID&s=1&m=231&host=www.google.co.id&ts=1496719998&sig=ALNZjWmbrn6tvnA4UIZuJKqsPXTqmuNyPQ](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/&ei=LCpOGAHu&lc-id-ID&s=1&m=231&host=www.google.co.id&ts=1496719998&sig=ALNZjWmbrn6tvnA4UIZuJKqsPXTqmuNyPQ) , Selasa, 6 juni 2017, pukul 10.40 WIB.

Hukum Online, *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3 Oleh: Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA.*,

Law Community, *Hak Asasi Tersangka Untuk mendapat Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, diakses dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/hak-asasi-tersangka-untuk-mendapat-bantuan-hukum-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 20.00 WIB.

<http://acch.kpk.go.id/id/ragam/makalah/tata-laksana-benda-sitaan-barang-rampasan-dalam-rangka-pemuihan-aset-hasil-tipikor>

http://www.academia.edu/14478041/Pengertian_Hukum_Menurut_Para_Ahli_Hukum_Indonesia, Sabtu 10 Juni 2017, pukul 10.00 WIB.

http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA Minggu, 09 April 2017 10.09 WIB

http://googleweblight.com/?lite_url=http://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan&ei=MVw0ma_1&idID&s=1&m=231&host=www.google.co.id&ts=1488532136&sig=AJsQQ1C-PLI1mxrkMksqYvwAOmuAWRpu9Q

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540d7c056fc44/hak-imunitas-dan-asas-persamaan-kedudukan-di-hadapan-hukum-dalam-uu-md3-boleh--prof-mardjono-reksodiputro--sh--ma>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 21.00 WIB.

<http://mercubuana.ac.id/file/MataKuliahCiriUniversitas/Panti%20Rahayu%20-%20Etik%20UMB%20%5B90004%5D/Modul%20Etik%20UMB&20%5BTM10%5D.doc>

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar.html#>, Sabtu 10 Juni 2017, pukul 10.45 WIB

Michibeby, *Asas – Asas Dalam Hukum Acara Pidana*, diakses dari <https://michibeby.wordpress.com/2012/11/20/asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana/> pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 5.30 WIB.

Tata Laksana Benda Sitaan Dan Barang Rampasan,
http://googleweblight.com/?lite_url=http://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan&ei=MVw0ma_1&I-idID&s=1&m=231&host=www.google.co.id&ts=1488532136&sig=AJsQQ1C-PLI1mxrkMksqYvwAOmuAWRpu9Q